



## PENGANTAR

Dalam Kilas Pendidikan edisi kali ini, tulisan terkait guru dan desain pembelajaran dipaparkan dengan berbagai perspektif. Pandangan mengenai perlunya kajian ulang terhadap berbagai aspek kompetensi yang diperlukan guru dipaparkan Bukik Setiawan dalam tulisannya "Kompetensi Guru: Hasil Riset atau Hasil Rapat," yang disajikan dengan pendekatan berbasis kompetensi kerja, relevansi antara poin-poin kompetensi guru dalam UU dengan kinerjanya dirasa masih minim pembuktian melalui riset. Kemudian, dengan perspektif sistem pengajaran, Sri Wahyaningsih menyampaikan pandangan akan perlunya pemisahan peran guru dalam hal tugas administratif yang seringkali meleburkan tugas utamanya sebagai pendidik.

Selain itu, Novi Poespita dalam tulisannya "Desain Tambal Sulam Pendidikan Karakter di Indonesia" mengkritisi betapa desain pembelajaran terkait isu *full day school* yang digadang-gadang ditujukan untuk

pengembangan karakter peserta didik justru berpotensi meleburkan makna karakter itu sendiri. Idealnya menjadi bagian yang terintegrasikan dalam proses pembelajaran, di mana pengembangan berfokus pada peningkatan kualitas bukan penambahan kuantitas waktu belajar di kelas, sehingga terkesan *tambal sulam* pengajaran yang sudah ada. Saya sendiri diberi kesempatan untuk memaparkan pandangan saya terkait desain pembelajaran. Dalam hal ini, perlunya penghayatan penuh bagi peserta didik (mahasiswa) pada setiap rangkaian pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih dan semoga Kilas Pendidikan Edisi 12 ini memberikan kebermanfaatan yang berarti bagi pembaca.

Editor,  
Chandra C. A. Putri

**KOMPETENSI GURU: HASIL RISET ATAU HASIL RAPAT?**

**DESAIN TAMBAL SULAM PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA**

T. Novi Poespita Candra, M.Si, Psikolog (PhD cand)

**GURU UNTUK MURID VS GURU UNTUK ADMINISTRASI**

**BEKERJA SEBAGAI MAHASISWA YANG BAIK**

Chandra C. A. Putri

**TAJUK  
EDISI 12**  
[www.pspk.web.id](http://www.pspk.web.id)

## KOMPETENSI GURU: HASIL RISET ATAU HASIL RAPAT?

Oleh: Bukik Setiawan, Peneliti PSPK  
Dosen Kampus Guru Cikal

Kualitas guru diyakini berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas guru akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas guru diterjemahkan menjadi kompetensi yang diatur dalam Undang Undang tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang Undang tersebut, kompetensi guru terdiri dari empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Empat kompetensi tersebut diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Sayangnya, hasil uji kompetensi guru tahun 2015 yang diikuti 1,6 juta guru menunjukkan lebih dari 1,3 juta guru mendapat nilai di bawah 60 dari skala 0 - 100 (Kompas, Kualitas Guru Terus Diperbaiki, 16 September 2016). Nilai uji kompetensi guru tersebut dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi guru melalui program Guru Pembelajar. Hipotesisnya, bila kompetensi guru dikembangkan maka nilai uji kompetensi guru akan naik dan kualitas guru meningkat.

Tulisan ini mencoba mengkritisi konsep kompetensi guru yang digunakan sebagai dasar dalam uji kompetensi guru dan program pengembangan kompetensi guru.

**Apakah konsep kompetensi guru yang digunakan cukup memadai untuk dasar pengembangan kompetensi guru?**

### Konsep Kompetensi: Tiga Ciri Penting

Lyle M. Spencer, Jr. Ph.D. dan Signe M. Spencer pada tahun 1993 menerbitkan sebuah buku berjudul *Competencies at Work*, merupakan salah satu buku yang pertama membahas mengenai kompetensi kerja. Dalam buku itu, mereka mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik mendasar seseorang yang menyebabkan kinerja efektif dan/atau superior mengacu pada suatu kriteria acuan (Lyle M. Spencer, Jr. Ph.D. dan Signe M. Spencer, 1993). Dari pengertian tersebut, ada 3 elemen yang menarik dibahas lebih lanjut yaitu: **karakteristik mendasar, penyebab kinerja efektif dan/atau superior, dan kriteria acuan.**

**Karakteristik mendasar** berarti karakteristik yang menjadi dasar dari berbagai perilaku yang ditunjukkan seseorang. Sebagai dasar, karakteristik mendasar cenderung tetap meski ada perubahan situasi dan perubahan waktu. Semisal seseorang berperilaku membuang sampah pada tempatnya di suatu kompleks perumahan, tapi membuang sampah sembarangan di jalan, maka perilaku tersebut bukan termasuk karakteristik mendasar karena berubah ketika situasi berubah. Jadi dokumen kompetensi memuat karakteristik yang cenderung tetap, bukan karakteristik yang cenderung berubah. Elemen ini penting karena seringkali upaya mengidentifikasi kompetensi terjebak pada daftar panjang kemampuan.

**Penyebab kinerja efektif dan/atau superior** berarti kompetensi yang dimiliki seseorang menyebabkan baik buruk kinerjanya. Bila seseorang menguasai sebuah kompetensi, maka kinerjanya akan mengalami peningkatan. Semisal ada seseorang yang menguasai kemampuan berkomunikasi, tapi bila tidak menyebabkan kinerjanya meningkat maka kemampuan berkomunikasi tidak bisa



disebut sebagai kompetensi. Kecenderungan umum mengkaitkan kinerja yang baik dengan beragam kemampuan. Pertanyaan mengapa guru kinerjanya baik bisa menghasilkan daftar kemampuan yang panjang dan terus bertambah. Jadi studi kompetensi harus bisa membuktikan hubungan antara daftar kemampuan dengan kinerja pada suatu pekerjaan. Kemampuan yang terbukti berkaitan dengan efektivitas kinerja yang bisa disebut sebagai kompetensi.

**Kriteria acuan** berarti kompetensi menyebabkan kinerja efektif pada suatu kriteria spesifik yang berlaku di dunia nyata. Bila kriteria berhasil pada suatu pekerjaan berubah maka bisa jadi kompetensinya pun berubah. Semisal, kriteria guru efektif adalah mampu mengajarkan 10 bab dalam satu semester membutuhkan kompetensi yang berbeda dengan kriteria guru efektif sebagai mampu membantu anak mandiri mempelajari 10 bab dalam satu semester. Tidak ada kompetensi yang berlaku umum karena kompetensi mengacu pada suatu kriteria tertentu. Kriteria tersebut seringkali dipengarungi konteks dari suatu pekerjaan. Guru di perkotaan bisa jadi mempunyai tuntutan pekerjaan yang berbeda dengan guru di pedesaan. Jadi studi kompetensi menyelidiki kemampuan yang terkait dengan pekerjaan spesifik dalam suatu konteks yang spesifik.

### Catatan Terhadap Kompetensi Guru

Mengacu pada konsep kompetensi di atas, maka dokumen kompetensi harus menunjukkan bahwa kompetensi yang tercantum berisi: a.) Karakteristik mendasar, bukan daftar panjang kemampuan; b.) Penyebab kinerja efektif dan/atau superior, yang dibuktikan melalui riset; dan c.) Mengacu pada kriteria acuan, bukan gambaran abstrak yang berlaku umum.

**Karakteristik mendasar.** Undang-undang Guru dan Dosen menyebutkan 4 kategori kompetensi guru yang diterjemahkan peraturan menteri menjadi sejumlah kompetensi inti. Pada guru SD/MI, 4 kategori kompetensi guru diterjemahkan menjadi:

1. Kompetensi pedagogik yang dirinci menjadi 10 kompetensi inti.
2. Kompetensi kepribadian yang dirinci menjadi 5 kompetensi inti.
3. Kompetensi sosial yang dirinci menjadi 4 kompetensi inti.
4. Kompetensi profesional yang dirinci menjadi 5 kompetensi inti.

Dengan penjelasan tersebut, untuk menjadi guru yang efektif maka seseorang harus menguasai 24 kompetensi inti. Jumlah kompetensi guru hingga 24 kompetensi memang terkesan indah seolah kita mengidamkan guru yang super dan serba bisa. Namun di sisi lain, banyaknya kompetensi tersebut melahirkan pertanyaan apakah 24 kompetensi tersebut merupakan karakteristik mendasar atau hasil identifikasi berbagai kemampuan yang seolah-olah terlihat ada keterkaitannya dengan guru? Padahal, semakin banyak kompetensi, semakin banyak riset yang dibutuhkan untuk membuktikannya. Semakin banyak kompetensi, semakin banyak asesmen yang dibutuhkan untuk mengukurnya.

### Penyebab kinerja efektif dan/atau superior.

Penulis mencoba mencari tahu asal muasal terumuskannya kompetensi guru di undang-undang maupun peraturan menteri, tapi sejauh ini belum menemukan kajian atau laporan riset yang menunjukkan daftar kompetensi guru terkait dengan kinerja guru yang efektif dan/atau superior. Tidak ada pula paparan yang menjelaskan relevansi kompetensi yang disebutkan dalam keterkaitannya dengan kinerja guru. Padahal sebelum sampai setelah dirumuskan, hubungan kompetensi dengan kinerja seharusnya terus dikaji.

**Kriteria acuan.** Peraturan tentang kompetensi tidak memaparkan kriteria guru yang dinilai berhasil baik secara umum maupun dalam konteks spesifik (desa-kota, pertanian-nelayan dll). Tanpa kriteria acuan, maka berbagai kemampuan bisa disebutkan sebagai kompetensi yang harus dimiliki guru. Riset untuk menguji efektivitas kompetensi pun membutuhkan kriteria acuan untuk melihat apakah suatu kompetensi membedakan antara guru berkinerja rendah dengan guru berkinerja efektif, atau guru berkinerja efektif dengan guru berkinerja superior. Apakah suatu kompetensi dibutuhkan semua guru atau sebatas pada guru di konteks spesifik?

Pembacaan terhadap konsep kompetensi guru membuat penulis bertanya,

*Apakah kompetensi guru adalah hasil riset atau semata hasil rapat?*

## Kaji Kembali Kompetensi Guru

Pertama, merumuskan kriteria guru berkinerja efektif dan berkinerja superior. Kedua, melakukan uji perbedaan kompetensi pada 3 kategori guru pada beragam jenjang dan konteks: berkinerja rendah, efektif dan superior. Undang dan dengarkan para guru dari beragam jenjang dan konteks sebagai narasumber/partisipan riset. Dosen sebagai peneliti hendaknya mendengarkan guru, merumuskan dan memverifikasi model kompetensi guru ke para guru. Ketiga, berdasarkan hasil riset tersebut kaji kembali daftar kompetensi guru. Pertahankan kompetensi lama yang relevan, tambahkan kompetensi baru yang teruji berkaitan dengan kinerja guru dan menghapus atau merevisi kompetensi lama yang tidak/kurang relevan.

Rekomendasi tersebut dibutuhkan untuk memastikan pengembangan kompetensi guru berdampak pada kinerja guru. Jangan sampai biaya besar uji dan pengembangan kompetensi guru sudah dihabiskan tapi kinerja guru relatif jalan di tempat karena sudah keliru sejak di konsep.

## DESAIN TAMBAL SULAM PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA

Oleh: T. Novi Poespita Candra, M.Si, Psikolog (PhD cand)  
Dosen Fakultas Psikologi UGM  
Co-founder Gerakan Sekolah Menyenangkan

Beberapa saat lalu, untuk kedua kalinya masyarakat diributkan dengan diskursus mengenai sekolah lima hari yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Muhadjir Efendi. Dalam beberapa konferensi persnya, beliau mengungkapkan bahwa segera akan ada kebijakan sekolah *full day school* atau 5 hari yang diterapkan oleh negara pada seluruh sekolah Indonesia. Alasan yang dikemukakan beliau adalah agar sekolah memiliki cukup waktu untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang sesuai dengan *Nawa Cita* yang diungkapkan Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya tahun 2014. Selain itu, kebijakan *full day school* (5 hari sekolah) ini dianggap menjadi salah satu solusi agar anak-anak dapat menggunakan waktunya secara positif jika dibandingkan pulang ke rumah lebih awal, di mana anak justru berpotensi melakukan hal negatif tanpa pengawasan orangtua.

Namun, karena pro dan kontra pandangan dalam masyarakat yang cukup keras, akhirnya Presiden Jokowi pun menunda ditetapkannya kebijakan tersebut dengan alasan akan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu. Mengapa terjadi pro dan kontra yang begitu dasyat? Bukankah sekilas kebijakan itu bertujuan baik? Tepatkah sebetulnya kebijakan *full day school* ini untuk konteks Indonesia terutama kaitannya dengan pendidikan karakter anak-anak bangsa?

Tulisan ini akan memotret dari sisi lain bahwa kebijakan *full day school* ini merupakan salah satu contoh sistem pendidikan Indonesia yang terbiasa dibangun dengan sistem tambal sulam, demikian juga dalam hal pendidikan karakter.

## Revolusi Mental dan Harapan Revolusi Pendidikan

Tahun 2014, saat Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI, ia mengemukakan sebuah konsep '*Revolusi Mental*' bagi bangsa Indonesia. Harapan kemudian muncul tentang adanya revolusi di bidang pendidikan karena mestinya mental bangsa sangat erat kaitannya dengan menumbuhkannya sejak dini melalui pendidikan. Apalagi, saat beliau mengemukakan pemikirannya tentang memberi porsi 70 % pendidikan karakter dan 30 % akademik di pendidikan dini dan dasar, 60% karakter dan 40% akademik di SMP, serta 30% karakter dan 70% akademik di SMA.

Pemikiran beliau ini sangat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh De Ro 'iste, Kelly, C, dkk tahun 2012<sup>1</sup> yang mengemukakan bahwa usia pendidikan dini dan dasar yaitu 3-12 tahun adalah masa yang paling krusial dalam memberikan kesempatan anak-anak secara partisipatif mengeksplorasi dirinya, emosinya, kepribadiannya, karakternya, dan juga mengenal lingkungannya. Mereka harus didorong untuk boleh mencoba apa saja dan mengenal apa saja yang bermanfaat untuk pengembangan dirinya. Sedangkan, usia SMP anak-anak sudah mulai difasilitasi mengenal 1 atau 2 kompetensi yang dilatih secara terus menerus dengan harapan karakternya telah ditemukan di usia awal. Sedang pada usia SMA, mereka diharapkan telah mempunyai prestasi dan kompetensi unggul dalam bidang tertentu yang disukainya.

<sup>1</sup>Angel de Roiste, et al. (2012) 'Is school participation good for children?' Associations with health and wellbeing." Health Education, vol 112, Iss 2, pp 88-104.



Harapan saya saat ini adalah ini akan menjadi hal fundamental yang nantinya akan menjadi bingkai bagi bangsa Indonesia menata ulang paradigma pendidikan yang dipilih yang kemudian berimplikasi pada kebijakan.

Paradigma lama pendidikan Indonesia yang menggunakan pendekatan standarisasi pada pendidikan dasar tidak akan efektif dan bersifat kontraproduktif dengan keinginan membangun 80 persen karakter anak-anak. Dalam pendekatan standarisasi yang biasa digunakan era industri, kesuksesan anak didik diukur dari tingginya nilai (skor) akademik yang diperolehnya, karena nilai itulah yang akan digunakan untuk bersaing dalam dunia kerja. Jika keberhasilan anak didik masih dinilai dengan cara itu, maka keberhasilan guru dan sekolah pun akan dilihat dengan cara yang sama yaitu tingginya nilai akademik yang dicapai murid-muridnya. Maka guru dan sekolah akan fokus mengembangkan hal tersebut sebagai sebuah capaian. Lalu mungkinkah mereka memiliki ruang dan fokus untuk mengembangkan karakter anak-anak yang persentasinya adalah 70 persen? Karena yang terjadi saat ini adalah sebaliknya 30% pengembangan diri dan karakter, 70% capaian akademik.

Lalu apa hal pertama secara implikasi kebijakan yang harus diubah? Tentu saja sistem asesmen. Sistem asesmen sebagai hilir merupakan kunci perubahan yang akan menggerakkan perubahan-perubahan di area lain seperti metode pengajaran, perubahan lingkungan, dan juga interaksi antarwarga sekolah dengan ekosistemnya. Perubahan secara ekologi inilah yang akan berkontribusi dalam pendidikan karakter anak-anak Indonesia.



Di beberapa negara maju lainnya seperti Finlandia atau Australia, pendidikan karakter di usia pendidikan dasar ditekankan pada sistem asesmen yang berbeda dengan Indonesia. Di negara tersebut, kesuksesan seorang anak tidak hanya diukur dalam akademik, namun pada penumbuhan 4 kompetensi abad 21 (kreativitas, komunikasi, kolaborasi dan berpikir kritis) serta munculnya karakter unik yang dimiliki setiap anak. Kesuksesan sekolah dan guru juga bukan diukur hanya dari prestasi akademik murid-murid di sekolah itu, namun pada tingkat angka kekerasan yang terjadi di sekolah, tingkat kasus perilaku yang muncul di sekolah, profil anak-anak yang melakukan kerja *volunteer* di masyarakat yang datanya diperoleh dari orangtua, anak dan masyarakat. Dengan sistem asesmen dan akreditasi yang seperti ini, maka guru dan sekolah akan memiliki paradigma, ruang dan waktu yang lebih luas untuk memberikan porsi lebih besar pada penciptaan lingkungan positif, membangun interaksi yang lebih intens dan hangat, serta perhatian lebih pada pengembangan diri dan karakter sesuai kebutuhan di usia perkembangannya.

Banyak penelitian yang telah dilakukan di beberapa negara diantaranya oleh Cahill, H dan Freeman (2007)<sup>2</sup> yang menemukan bahwa penumbuhan karakter baik tidak cukup hanya fokus pada pembiasaan perilaku atau fokus pada anak saja. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam pendidikan karakter: 1.)Penciptaan lingkungan fisik yang positif; 2.) Penciptaan interaksi yang positif antarwarga sekolah; 3.)Metode pengajaran dan asesmen yang sesuai dengan pengembangan karakter; 4.)Aktivitas yang mendukung penumbuhan kompetensi dan karakter positif; dan 5.)Membangun partisipasi seluruh warga sekolah. Berdasarkan teori ini, maka pendidikan karakter adalah tentang sekolah yang hijau dan bersih, toilet dan kantin yang bersih dan sehat, *setting playground* dan kelas yang memberi ruang gerak pada anak-anak.

Pendidikan karakter juga tentang menggunakan metode belajar mengajar yang merangsang anak bertanya, menemukan cara belajar di mana anak menemukan siapa dirinya, membantu anak-anak mengelola berbagai emosi juga membangun aktivitas seni, budaya, olahraga, kepemimpinan yang mendukung munculnya karakter positif.

<sup>2</sup>Cahill, H.and Freeman, E. (2007). Creating school environments that promote social and emotional wellbeing. In M. K. a. S. Carrington (Ed.), Schools and diversity, 2nd edition.

Hal ini tidak akan diberi porsi banyak ketika pengukuran keberhasilan hanya dari nilai akademik, maka hal terpenting adalah membuat alat ukur yang mampu mengukur kebahagiaan anak-anak bersekolah, motivasi anak-anak belajar, keterampilan anak-anak belajar secara mandiri, kemampuan anak-anak mengelola emosi dan perilaku, tingkat kekerasan dan agresivitas, atau bahkan keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Jika sistem evaluasi/asesmen diubah, maka penambahan jam pelajaran dengan tujuan pendidikan karakter mestinya tidak lagi dibutuhkan. Mengapa? Karena sejatinya pendidikan karakter telah dilakukan sejak anak-anak masuk gerbang sekolah, mengikuti segenap proses belajar mengajar yang tidak hanya mewadahi kemampuan kognitif tapi juga sikap dan perilaku. Menambahkan jam pulang sekolah hanya dengan alasan pendidikan karakter seolah-olah menjadi ingin mengatakan bahwa proses belajar mengajar dalam jam sekolah tidak cukup dan tidak mampu mewadahi kemampuan penumbuhan karakter anak-anak.

Kebijakan itu juga seolah-olah memandang bahwa kegiatan ekstra kurikuler lah yang mampu mewadahi

penumbuhan karakter baik anak-anak. Padahal semestinya tidak. Seluruh proses belajar mengajar di sekolah adalah pendidikan karakter selama dikelola dengan kulaitas belajar yang baik dan *platform* yang benar. Inilah mengapa saya melihat bahwa kebijakan *full day school* jika memang bertujuan untuk menumbuhkan karakter adalah kebijakan tambal sulam. Kebijakan ini mampu memperkaya aktivitas penumbuhan karakter anak-anak, namun masih sulit menjadi prioitas untuk menjadi dasar pengembangan guru dan sekolah jika pengukurannya kesuksesan akhirnya adalah tentang prestasi akademik semata.

Berdasarkan hal ini, semestinya fokus pemerintah bukan pada penambahan jam pelajaran di sekolah, namun pada penciptaan sistem evaluasi/asesmen anak serta sistem akreditasi sekolah yang mampu secara komperhensif mengukur keberhasilan pendidikan dasar dengan proporsi besar pada penumbuhan karakter dan kompetensi anak-anak yang mampu menggerakkan dan mengubah guru dan sekolah untuk fokus dan memberi porsi besar pada membangun sebuah ekosistem belajar mengajar berkualitas dan mampu mewadahi penumbuhan karakter baik dan kompetensi yang dibutuhkan anak- anak di era Informasi.

## GURU UNTUK MURID VS GURU UNTUK ADMINISTRASI

Oleh: Sri Wahyaningsih  
Pendiri Sanggar Anak Alam Yogyakarta

Sebulan yang lalu saya pulang ke desa, menengok ibu. Kebetulan yang menemani ibu di desa adalah adik bungsu yang istrinya berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar di desa tersebut. Selama seminggu di rumah, sulit sekali bisa ngobrol dengan adik ipar karena kesibukan sebagai guru. Kesibukan tidak hanya di sekolah namun di rumah pun pekerjaan sekolah masih menumpuk.

Disela-sela mengerjakan tugas, saya mencoba mendekatinya, ingin tahu sebetulnya apa yang dikerjakannya. Ternyata adik ipar saya sedang mengerjakan *rapot*. "Kok banyak sekali?" Tanya saya, "Satu kelas ada berapa murid?" "Satu kelas ada 25 murid" Jawabnya. Tetapi, dia mengerjakan *rapot* hingga 125 *rapot* karena teman teman guru yang lain tidak dapat mengerjakan *rapot* dengan komputer, sementara *rapot* sekarang harus dikerjakan dengan komputer.

Tidak hanya *rapot* yang harus komputerisasi, laporan-laporan yang lain juga harus komputerisasi. Sementara guru-guru yang sudah tua sudah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga guru yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer menjadi tumpuan untuk mengerjakan tugas tugas administrasi.

Kemajuan teknologi yang seharusnya mempermudah pekerjaan akhirnya malah menjadi beban. Guru tidak mempunyai banyak waktu untuk persiapan mengajar, memperhatikan anak didik. Setiap jenis bantuan membutuhkan laporan yang rumit, sementara tidak semua sekolah mempunyai petugas administrasi. Sebagian tugas administrasi sekolah dirangkap oleh guru.

Apalagi kalau guru akan mengajukan sertifikasi, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang lumayan banyak, sehingga sebagian besar waktu guru habis untuk mengerjakan administrasi.

Guru perlu belajar, mempersiapkan diri untuk mengajar. Guru juga perlu mengenal lebih jauh anak didiknya sehingga dapat mengajar lebih efektif, berkomunikasi dengan orangtua murid untuk memantau perkembangan anak baik di sekolah maupun di rumah. Laporan perkembangan anak tidak sebatas dalam penulisan *rapot*, tetapi komunikasi dengan orang tua jauh lebih efektif. Sehingga perlu dipertanyakan untuk apa penulisan *rapot* yang rumit itu? Bisakah penulisan *rapot* disederhanakan sehingga tidak menyita waktu guru dan orangtua yang sederhana yang tidak sekolah juga dapat memahaminya?

Anak-anak butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dalam dunia yang sangat terbuka, segala informasi baik yang positif maupun negatif sangat mudah diakses oleh anak-anak, sehingga mereka membutuhkan pendampingan yang intensif. Di sekolah, guru berperan sebagai pengganti orangtua, sehingga guru tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur kehidupan, turut membentuk karakter anak didik.

Tugas administrasi sebaiknya dipisahkan dengan tugas guru sebagai pendidik. Administrasi yang dikerjakan oleh guru sebatas yang ada hubungan dengan proses belajar mengajar, catatan proses masing masing anak, sehingga guru paham betul perkembangan dan kekurangan anak didik. Dengan cara demikian guru dapat membuat perencanaan mengajar lebih baik. Guru mempunyai bahan untuk berkomunikasi dengan orangtua perihal perkembangan anaknya.

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan dengan adanya hubungan yang baik antara guru – murid dan orangtua. Guru yang banyak dibebani tugas administrasi dapat dipastikan akan sibuk dan kurang perhatian terhadap anak. Anak sering ditinggal dan hanya diberi tugas untuk mengerjakan sendiri. Guru yang tergesa - gesa atau dalam bahasa Jawa disebut *kemrungsung* akan membuat anak tidak konsentrasi dan cepat jenuh.

Program komputerisasi yang diharapkan dapat mempermudah tugas guru kadang malah menjadi beban karena adanya kesenjangan kemampuan guru menyerap teknologi, ketersediaan listrik dan jaringan internet. Sehingga, banyak guru yang harus pergi jauh ke kota untuk mendapatkan jaringan internet dan meninggalkan tugas mengajar yang berarti meninggalkan anak-anak.

Untuk meningkatkan mutu belajar anak-anak hal tersebut diatas tidak dapat dibiarkan berlarut larut. Pergeseran Guru menjadi petugas administrasi harus segera disudahi. Para pengambil kebijakan seyogyanya memperhatikan tugas pokok seorang guru. Anak-anak membutuhkan guru yang mempunyai dedikasi tinggi untuk sebuah pengabdian. Anak-anak membutuhkan teman, perhatian dan kasih sayang untuk mengarungi kehidupan yang penuh tantangan.

Saatnya mengembalikan peran guru untuk murid bukan guru untuk administrasi, demi pendidikan yang lebih baik di negeri ini.



## BEKERJA SEBAGAI MAHASISWA YANG BAIK

Oleh: Chandra C. A. Putri  
Research Assistant PSPK

Terminologi “bekerja” digunakan dalam judul tulisan ini semata-mata untuk merefleksikan pengalaman yang saya rasakan ketika berstatus sebagai mahasiswa setengah tahun ke belakang, di mana proses belajar di kampus menjadi salah satu momen yang sangat menyenangkan. Menyenangkan karena sebisa mungkin “nyawa” saya sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun luar kelas. Sebagaimana esensi bekerja sebagai *sustained physical or mental effort to overcome obstacles and achieve an objective or result*<sup>1</sup>, secara konsisten saya menjalankan peran sebagai mahasiswa kala itu. Lalu apakah saya sudah menjadi mahasiswa yang “bekerja” dengan baik? Belum tentu.

Bahkan, belakangan saya baru memahami pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar. Sebagai salah satu *turning point* dalam mengembangkan karir, saya mengamini bahwa proses pembelajaran “setengah nyawa” yang dialami oleh sebagian besar mahasiswa menjadi hal yang mubazir. Karp dan Yoels (1976)<sup>2</sup> dalam studinya mengemukakan bahwa dalam lingkup perguruan tinggi dosen berceramah hampir 80% selama jam belajar, hanya sekitar 10 dari 40 mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas diskusi, dan biasanya, hanya 5 mahasiswa yang menonjol dalam diskusi tersebut. Sebagian kecil mahasiswa mengambil perannya untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi di ruang kelas, sementara sebagian besar diantaranya terlibat sebagai “*civil attention*” cukup memperhatikan dan mengangguk ketika paham, tertawa jika perlu atau sebagian tampak penuh perhatian tanpa mengambil risiko untuk terlibat dalam diskusi.

### Mengapa partisipasi belajar mahasiswa cenderung rendah?

Sebelum mengeksplorasi bersama mengapa partisipasi belajar mahasiswa itu cenderung rendah, mari kita mencari tahu makna dari partisipasi belajar itu sendiri, sebagaimana saya sebut sebagai melibatkan “nyawa” sepenuhnya ketika belajar.

*Mahasiswa mungkin enggan untuk berpartisipasi secara terbuka dalam proses belajar, misalnya karena takut akan “aturan tidak tertulis”, namun sebagian diantaranya berharap bisa mengkomunikasikan ketertarikan mereka pada subjek pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat bentuk partisipasi lain disamping bentuk partisipasi konvensional ini yang jangan jangan memang membuat mereka menjadi ‘civil attention’.*

Kutipan tersebut merupakan *paraphrase* kalimat yang dituliskan Weaver dan Jiang Qi (1999)<sup>3</sup> dalam studinya yang berjudul “*Classroom Organization and Participation: College Students’ Perceptions*,” yang secara implisit menggambarkan bahwa partisipasi mahasiswa tidak melulu digambarkan sebagai keterlibatan mereka dalam diskusi di ruangan tetapi di luar ruangan kelas, dalam hal ini terkait proses pembelajaran.

Kembali pada tujuan kita untuk mengeksplorasi **mengapa partisipasi belajar mahasiswa cenderung rendah?** Weaver dan Jiang Qi memaparkan hipotesanya terkait hal-hal yang dipersepsikan mahasiswa yang mampu mempengaruhi partisipasi mereka dalam aktivitas belajar di kampus. Dari sekitar 1550 respon mahasiswa yang ditelitinya, Weaver dan Jiang Qi merumuskan sejumlah aspek yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yakni: ukuran kelas, otoritas dosen, interaksi antara mahasiswa dan dosen, usia, gender, persiapan belajar, rasa takut akan kritikan dan kepercayaan diri. Aspek-aspek tersebut kemudian dikembangkan Weaver dan Jiang Qi menjadi sejumlah pernyataan dalam instrumen penelitian.

Melalui sejumlah pernyataan dalam instrumen yang dikembangkan Weaver dan Jiang Qi tersebut, penulis melakukan analisa<sup>4</sup> dan menemukan tiga aspek yang paling kentara terkait keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar.

<sup>1</sup>Kamus Merriam-Webster. (2017). Dapat diakses di: [www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com)

<sup>2</sup>Karp, D. A., & Yoels, W. C. (1976). The college classroom: Some observations on the meaning of student participation. *Sociology and Social Research*, 60, 421–439.



### Relasi antara dosen dan mahasiswa

Hierarki kelas yang membedakan kekuatan antara dosen dan mahasiswa secara implisit mungkin menghambat partisipasi mahasiswa dalam aktivitas belajar, 54% responden mahasiswa yang menjadi subjek analisa instrumen yang dilakukan penulis menjawab “setuju” dengan pernyataan “saya melihat dosen sebagai orang yang berwenang-mengambil keputusan-di kelas, peran saya sebagai mahasiswa adalah menyerap apa yang beliau sampaikan.” Persepsi mahasiswa terkait otoritas pengajar ini mungkin bisa mengurangi rasa percaya diri mereka dan secara tidak langsung mendorong pasifnya mereka dalam aktivitas pembelajaran.

Ketika hierarki kelas ini mengurangi partisipasi dalam aktivitas belajar, dosen bisa menginisiasi suatu interaksi dengan mahasiswa dalam berbagai cara. Sebagai contoh, sebagian mahasiswa memilih untuk berbincang santai dengan dosen di luar kelas. Minimnya ruang dialog di luar kelas ini juga diungkapkan oleh 55% responden mahasiswa yang menjadi subjek analisa penulis terhadap instrumen, di mana mereka memberikan respon “kadang-kadang” pada pernyataan “saya bertemu/ngobrol-ngobrol dengan dosen di luar aktivitas perkuliahan.” Bahkan, jika memungkinkan dosen bisa melibatkan mahasiswanya dalam proyek penelitian, seperti konferensi. Jika tidak, cara yang kreatif namun sederhana juga bisa dilakukan oleh dosen untuk meningkatkan interaksi diantara mereka. Misalnya, dengan bersama-sama mendokumentasikan hasil pembelajaran mahasiswa melalui *blog* atau kanal *Youtube*<sup>5</sup>. Dosen yang mengekspresikan ketertarikannya pada pengembangan cara intelektual mahasiswa melalui proses pembelajaran mungkin akan memicu kepercayaan diri mahasiswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran.

### Relasi dengan sesama rekan mahasiswa

Seringkali mahasiswa jarang berkomunikasi dengan dosen terkait terbatasnya waktu dan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Mahasiswa biasanya mengandalkan komunikasi dengan sesama rekan mahasiswa lainnya untuk mengontrol sejumlah aspek pembelajaran yang harus mereka tempuh di kampus. Struktur informal seperti ini berhubungan dengan *classroom-related behaviors*. Di mana, mahasiswa yang terlihat terisolir mungkin tidak luput dari pengaruh mahasiswa lain, perilaku mereka berorientasi pada “jumlah” penerimaan dari mahasiswa lain. Secara implisit, hal ini menggambarkan kekhawatiran mereka akan penolakan dari sesama rekan mahasiswa, dalam hal ini terkait dengan proses belajar, 49% responden mahasiswa yang menjadi subjek analisa instrumen penulis menjawab “setuju” dengan pernyataan “keinginan saya untuk terlibat/berpartisipasi di kelas terhambat oleh rasa malu yang mungkin membuat saya kikuk, atau penolakan oleh teman-teman di kelas.”

Sejumlah dosen mungkin merasa heran mengapa seringkali proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan hening. Mayoritas mahasiswa yang diam mungkin berpikir bahwa mereka akan membenci mahasiswa yang dianggap “memonopoli kelas”, mereka khawatir dengan bagaimana penilaian teman-teman kelas terhadap mereka dan ketakutan mereka untuk terlihat “lebih bodoh dari mahasiswa lain” seringkali menjadi alasan utama untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan belajar di kelas. Relasi mereka dengan sesama rekan mahasiswanya ini meregulasi norma yang tercipta dalam ruang belajar secara informal. Oleh karenanya, sebagian mahasiswa yang “tidak ingin terlihat begitu antusias” terhadap subjek pembelajaran biasanya melakukan komunikasi dengan dosen di luar jam belajar.

<sup>3</sup>Weaver, R., & Qi, Jiang. (2005). Classroom Organization and Participation: College Students' Perceptions. *The Journal of Higher Education*, Volume 76, Number 5.

<sup>4</sup>Setelah instrumen diterjemahkan dan diujikan kepada 100 mahasiswa, penulis melakukan analisis item menggunakan pemodelan Rasch. Dari 16 item yang diuji, terdapat 6 buah item/pernyataan yang menunjukkan bahwa item benar-benar fit dengan pemodelan. Item-item tersebut dieksplorasi secara teoritis melalui pemaparan poin-poin aspek terkait keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar tersebut.

## Gender

Aspek ketiga yang cukup kentara dengan hasil analisa penulis terhadap item-item pernyataan yang menggambarkan keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar adalah gender. Meskipun, hal ini tidak menjadi patokan pasti, hanya satu pernyataan yang secara signifikan memiliki pola respon yang berbeda antara responden mahasiswa perempuan dan laki-laki<sup>6</sup>. Di mana mahasiswa perempuan lebih sulit menyetujui pernyataan “saya bertemu/ngobrol-ngobrol dengan dosen di luar aktivitas perkuliahan” daripada mahasiswa laki laki. Hal ini, mungkin bisa dipahami dari perbedaan pola komunikasi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall dan Sandler (1982)<sup>7</sup> bahwa: “..the classroom offers a “chilly” climate for women, the dominant view has been that our educational system is hierarchical, competitive, and individualistic, and that it encourages public displays in intellectual exchange and argument, as such, it favors ‘masculine’ forms of communication.”

Poin penting yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah, menjadi mahasiswa yang bekerja dengan baik dapat ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam rangkaian proses pembelajaran terkait bidang yang diampu, keterlibatan mahasiswa dalam rangkaian belajar ini bisa memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis<sup>8</sup> yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Selain itu, hal-hal yang mungkin menghambat partisipasi mahasiswa dalam proses belajar di kampus bisa dipertimbangkan oleh dosen sebagaimana yang telah dipaparkan penulis.

<sup>6</sup>Salah satu elemen desain pembelajaran pada MP Psikologi Belajar di jurusan Psikologi UPI-Bandung, bersama dosen, mahasiswa mendokumentasikan sebagian hasil belajarnya dalam blog ([www.psiologibelajarupi.wordpress.com](http://www.psiologibelajarupi.wordpress.com)) dan kanal Youtube (Refleksi Psikologi Belajar)

<sup>6</sup>Dilakukan analisis DIF (Differential Item Functioning) pada instrumen, dan ditemukan pola respon yang berbeda antara responden perempuan dan laki-laki pada pernyataan tersebut (Prob DIF <5%)

<sup>7</sup>Hall, R., & Sandler, B. (1982). *The classroom climate: A chilly one for women?* Washington, DC: Project on the Status and Education of Women, Association of American Colleges.

<sup>8</sup>Garside, C. (1996). Look who's talking: A comparison of lecture and group discussion teaching strategies in developing critical thinking skills. *Communication Education*, 45, 212–227.

**KILAS PENDIDIKAN** memberikan informasi dan ulasan tentang berbagai kebijakan pendidikan secara ringkas dengan isu-isu kontekstual yang dikeluarkan oleh PSPK.

**Pemimpin Redaksi:** Isabella Tirtowaluyo **Redaktur:** 1. Henny Supolo 2. Ifa H. Misbach 3. Najelaa Shihab  
**Editor:** Hasan Asyari, dan Chandra C. A. Putri

**TERAS SEBELAS**

Jl. Jeruk Purut No. 11, Jakarta Selatan, 12560 | 02178836417  
| [kilas@pspk.web.id](mailto:kilas@pspk.web.id)  
[www.pspk.web.id](http://www.pspk.web.id)



PSPK.Indonesia



pspk\_id



pspk\_id